

## Australia Fokus Bangun Aliansi Indo-Pasifik

SYDNEY(IM) - Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan membangun aliansi Indo-Pasifik dengan negara-negara yang berpikiran sama akan menjadi prioritas utama bagi pemerintahnya, Rabu (5/8). Dia memperingatkan langkah militerisasi di wilayah itu belum pernah terjadi sebelumnya.

"Tantari, Indo-Pasifik adalah pusat kompetisi strategis. Ketegangan atas klaim teritorial semakin meningkat," kata Morrison kepada Aspen Security Forum secara virtual yang mempertemukan para pemimpin pemerintah dan militer bersama para pakar.

Australia bulan lalu mengatakan, akan meningkatkan pengeluaran pertahanan sebesar 40 persen selama 10 tahun ke depan. Anggaran itu akan digunakan untuk membeli peralatan militer jarak jauh yang akan difokuskan pada kawasan Indo-Pasifik yang menjadi wilayah persaingan Beijing dan Canberra. Ketegangan diplomatik antara Tiongkok dan Australia baru-baru ini memburuk karena berbagai masalah, termasuk seruan Australia untuk penyelidikan internasional tentang asal-usul virus korona. Ter-

lebih lagi gugatan Australia tentang penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional baru di Hong Kong.

Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) dan Australia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi tentang Tiongkok. Kedua negara bersepakat perlunya menggerakkan tatanan global yang berdasarkan pada peraturan, tetapi Australia menekankan hubungannya dengan Tiongkok itu penting dan tidak berniat merusaknya.

Morrison mengatakan, kebangkitan Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama telah baik untuk ekonomi global, kawasan Indo-Pasifik, dan Australia. "Namun dengan peningkatan ekonomi menjadi tanggung jawab," katanya.

Perdana Menteri mengatakan, Tiongkok dan AS bersama-sama memiliki tanggung jawab khusus untuk menghormati hukum internasional dan harus menyelesaikan perselisihan secara damai. "Ini berarti komitmen untuk interaksi ekonomi berbasis aturan. Baik paksaan maupun pengunduran diri dari sistem internasional adalah jalan ke depan," katanya. ● gul

## Banjir dan Tanah Longsor di Korsel Tewaskan 14 Orang

SEOUL(IM) - Sebanyak 14 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang mengungsi di rumahnya saat hujan deras selama 42 hari berturut-turut memuncak di tanah longsor di Korea Selatan (Korsel).

Ini menjadi musim hujan terlama di Korsel dalam tujuh tahun terakhir. Hujan lebat yang juga terjadi di Tiongkok, Thailand, Myanmar dan India dalam beberapa hari terakhir telah menenggelamkan lahan pertanian dan membanjiri jalan raya dan jembatan di Seoul.

Tiga korban meninggal termasuk tiga warga Selandia Baru dari keluarga yang sama yang ditemukan meninggal pada Senin (3/8) setelah tanah longsor menenggal di tempat mereka berlibur di Gyeongju, timur laut Seoul.

"Para korban meninggal diyakini wanita berumur 65 tahun, putrinya umur 36 tahun dan cucunya berumur tiga tahun," papar pejabat kepolisian Gyeongju.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Selandia Baru menyatakan telah mengeta-

hui musibah itu dan menyediakan bantuan konsuler.

Presiden Korsel Moon Jae-in mengukuhkan dengan dampak hujan selama 42 hari berturut-turut. Para pejabat menyatakan hujan lebat itu merupakan yang terlama sejak 2013.

Pada saat bersamaan, tim pekerja darurat telah kewalahan menghadapi pandemi virus corona. Moon menyerukan semua upaya untuk mencegah lebih banyak korban meninggal dunia.

Moon menyerukan warga agar waspada dengan tanah longsor dan lebih baik mengungsi untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor.

"Sebagian besar jalanan dan jembatan yang banjir di sepanjang Sungai Han di Seoul telah kembali beroperasi pada Selasa (4/8)," ungkap laporan kantor berita Yonhap.

Media Korea Utara (Korut) juga memperingatkan terjadinya banjir. "Semua sektor ekonomi nasional mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerusakan akibat hujan lebat," ungkap Kantor berita Korut, KCNA. ● ans



LOKASI LEDAKAN DI BEIRUT - LEBANON

Asap mengepul ke udara dari lokasi ledakan di Beirut, Lebanon, Selasa (4/8).

## Pemuda Thailand Tuntut Reformasi Kerajaan

Ini merupakan kali pertama kali kalangan muda secara terbuka menuntut reformasi Kerajaan Thailand. Selama ini perlawanan terhadap kerajaan dianggap sebagai tindakan tercela.

BANGKOK(IM) - Geliat antimonarki di kalangan anak muda Thailand mulai merebak. Bahkan mereka mulai berani menentang dengan turun ke jalan

raya pada beberapa hari terakhir untuk mempersoalkan kekuasaan absolut Raja Maha Vajiralongkorn. Ini merupakan kali pertama kali kalangan muda secara terbu-

ka menuntut reformasi Kerajaan Thailand. Selama ini perlawanan terhadap kerajaan dianggap sebagai tindakan tercela. Bahkan, di bawah peraturan Kerajaan Thailand, siapa pun yang mencoreng nama baik raja akan divonis penjara maksimal 15 tahun.

Namun, sampai kemari polisi tidak menghentikan aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan orang berpakaian penyiur tersebut. Mereka menyatakan siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan disekidiki dan ditangkap. Seorang pengacara, Anon Nampa (34) menilai kekuasaan raja Thailand kian menguat setelah naiknya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta militer. Namun, pada saat bersamaan, Thailand terancam semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Setelah Raja Vajiralongkorn naik takhta pada 2016, Kerajaan Thailand merevisi konstitusi yang memperkuat kewenangan raja. Sejak saat itu Raja Vajiralongkorn memiliki kekuasaan mengendalikannya sejumlah unit militer dan mengambil aset kerajaan bernilai puluhan miliar dolar AS.

Para aktivis menguluhkan kesewenang-wenangan kerajaan. Sedikitnya sembilan tokoh oposisi yang tinggal di luar negeri hilang sejak 2016, dua di antaranya

ditemukan sudah tidak bernyawa.

"Kami tak menentang raja dan tak berniat menggulingkan raja. Sebaliknya, kami menginginkan agar kerajaan tetap ada di tengah masyarakat Thailand, tapi di jalan yang lurus dan disahkan konstitusi yang demokratis," kata Anon kepada khalayak umum di Bangkok Democracy Monument.

Dua ketua kelompok aktivis lalu maju dan membacakan tuntutan. Mereka berharap reformasi aturan konstitusi yang akan memperkuat kekuasaan raja agar dibatalkan karena akan mengancam demokrasi. Wakil juru bicara pemerintah Thailand, Ratchada Thanadirek, mengatakan bahwa situasi itu diserahkan sepenuhnya kepada polisi. "Kami hanya ingin menyampaikan agar generasi muda Thailand memahami aturan konstitusi dengan baik," serunya.

Mahasiswa dan Mahanakorn dan Kasat University mendesak pemerintah Thailand agar mendenyakan suara pengunjuk rasa. Mereka juga menuntut agar aturan kerajaan direformasi sehingga larangan mengkritik kerajaan dapat dihapus. Selain itu, mereka menuntut agar pemerintahan Perdana Menteri Prayuth dibubarkan. Sebab, Prayuth dinilai terlalu banyak mengobrak-abrik Konstitusi. Di

Thailand, kritik terhadap pemerintah dan kerajaan sering terjadi, tapi baru kali ini disampaikan secara terbuka. Petugas polisi Thailand, Surapong Thammapat, mengatakan, sejauh ini tidak memiliki dasar hukum untuk menangkap para pengunjuk rasa. "Kami tak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan pengunjuk rasa. Setiap pelanggaran akan diproses hukum," katanya.

Prayuth mengatakan, sesuai permintaan raja, persekusi di bawah aturan kerajaan tidak pernah dicantumkan. Meski demikian, dia mengimbau agar masyarakat menghormati raja dan tidak pernah menjelk-jelakkan raja. Aksi kritik ini juga lebih banyak terjadi selama kekuasaan Raja Vajiralongkorn. Semasa kekuasaan Raja Bhumibol Adulyadej, sebagian besar masyarakat Thailand tunduk dan setia. Tapi, perdamaian itu berakhir setelah Raja Bhumibol meninggal dunia pada 2016.

"Aksi kritik terbuka terhadap Kerajaan Thailand oleh tokoh non-elite di tempat umum tanpa adanya respons dari polisi merupakan fenomena baru di sejarah Thailand," ujar Paul Chambers, tenaga pendidik hubungan internasional di Thailand Naresuan University. ● tom

## Polisi Malaysia Geledah Tiga Stasiun Televisi

KUALA LUMPUR(IM) - Polisi Diraja Malaysia (PDRM) melakukan pengeledahan terhadap tiga stasiun televisi secara terpisah yakni Aljazeera, Astro dan UnifiTV. Direktur Kantor Penyelidikan Kriminal PDRM, CP Dato' Huzir Bin Mohamed mengemukakan hal itu dalam keterangannya kepada media di Kuala Lumpur, Selasa (4/8).

Pengeledahan tersebut sesuai dengan perintah yang dikeluarkan Mahkamah Majistret Kuala Lumpur, Sepang dan Selangor. Pengeledahan dilakukan bersama-sama dengan pihak Komite Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) yang turut membawa kertas penyelidikan atas stasiun penyiaran tersebut. Mereka turut merampas komputer dan semua sitaan dibawa ke SKMM untuk penyelidikan lebih lanjut. Keterangan saksi-saksi lain turut diambil ketika pengeledahan tersebut untuk membantu penyelidikan dan diangkat ke kejaksaan dalam waktu terdekat.

PDRM menegaskan tindakan yang dilaksanakan ber-

dasarakan undang-undang dan tidak ada individu atau entitas yang terlepas dari semua tindakan jika melanggar undang-undang.

Pada kesempatan terpisah Aljazeera dalam pernyataannya mengatakan peristiwa tersebut terjadi setelah pihak berwenang mengumumkan mereka sedang menyelidiki stasiun televisi itu untuk hasutan, pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia negara sehubungan dengan program tentang perlakuan terhadap pekerja asing ilegal selama pandemi Covid-19.

Dalam peristiwa tersebut tujuh staf Aljazeera sudah diperiksa oleh polisi. Pejabat Malaysia dan televisi pemerintah mengkritik laporan Aljazeera yang dinilai sebagai tidak akurat, menyesatkan dan tidak adil.

Aljazeera menolak klaim ini dan mendukung kualitas dan ketidakterpencilan jurnalismenya staf Aljazeera di Malaysia juga menjadi sasaran peletonan online yang berkelambutan, termasuk ancaman kema-

lian dan pengungkapan detail pribadi mereka secara online.

Dalam pernyataan tersebut Aljazeera menyerukan pihak berwenang Malaysia untuk menghormati kebebasan media dan berhenti memperlakukan wartawan sebagai "penjahat".

Aljazeera memandang ini tidak hanya sebagai serangan terhadap dirinya sendiri tetapi pada kebebasan pers secara keseluruhan.

Peristiwa ini terjadi setelah anggota staf Aljazeera sebagai bagian dari penyelidikan yang diluncurkan setelah siaran laporan investigasi 101 Timur, "Locked Up in Malaysia's Lockdown" pada 3 Juli 2020.

Program tersebut mengamat perlakuan pemerintah terhadap pekerja asing ilegal selama pandemi Covid-19.

"Aljazeera menyerukan kepada pihak berwenang Malaysia untuk menghentikan penyelidikan kriminal ini ke jurnalis kami," kata Managing Director Aljazeera English, Giles Trendle. ● ans



BADAI TROPIS ISALAS DI NEW JERSEY - AS

Seorang pria berjalan ditengah angin kencang dan hujan di sepanjang tepi Sungai Hudson di kaki langit Kota New York, saat terjadi Badai Tropis Isaias di Weehawken, New Jersey, Amerika Serikat, Selasa (4/8).

**ARGO PANTES**  
PT. ARGO PANTES Tbk.

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat RUPS : Ruang Training Perseroan Jl. M.H Thamrin Km. 4 Cikokol, Tangerang 15117

Mata Acara Rapat :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris selama tahun 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

- Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke-4 untuk memperoleh persetujuan RUPST untuk perubahan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Mata acara RUPST ke-5 antara lain merupakan pemenuhan ketentuan Pasal 57 juncto pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

Ketentuan Umum Rapat :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga idan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan dengan 2 (dua) kriteria, yaitu :
  - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; atau
  - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 5 Agustus 2020.
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuki Kuasa untuk mewakilinya. Adapun penunjukan Kuasa dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 46 POJK No. 15/2020, yang mana pemegang saham Perseroan tidak diperkenankan memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan pencegahan penyebaran Covid-19, untuk mengurangi jumlah peserta Rapat yang hadir, Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak-pihak tertentu yang ditunjuk Perseroan (yaitu perwakilan PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk mewakili sekolompok besar Pemegang Saham dalam Rapat. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:
  - Pemegang Saham yang akan memberikan Kuasa secara konvensional dapat mengunggah formulir surat kuasa melalui situs website Perseroan (www.argopantes.com) ataupun dapat diperoleh pada setiap hari kerja di PT Argo Pantes Tbk., Jl. M.H. Thamrin Km 4, Cikokol Tangerang 15117, Banten, Indonesia (Bagian Corporate Secretary).
  - Surat kuasa asli yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham dan Kuasanya wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT EDI Indonesia selaku Badan Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yang beralamat di Wisma SMR 1, 3 & lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, dengan subjek "Surat Kuasa RUPS PT Argo Pantes Tbk." selambat-lambatnya harus sudah diterima 2 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar negeri, surat kuasa harus dilagikulasi oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
- Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020, Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") beserta dengan suara (voting) terhadap mata acara Rapat kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) sebagaimana dapat dipelajari melalui Situs Web Akses KSEI dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan ketentuan:
  - e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
  - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan terhadap Mata Acara RUPS melalui sistem eASY KSEI.
  - Jangka waktu Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan suara (voting)-nya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara (voting) untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri yang sah lainnya kepada petugas yang ditunjuk. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atau Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sampai yang terakhir.
- Sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib untuk mengikuti dan mematuhi standar protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat.
- Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui situs website Perseroan (www.argopantes.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. Bahan-bahan Rapat yang tersedia tersebut termasuk juga Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 ("Laporan Tahunan"). Perseroan menginformasikan bahwa Perseroan tidak menyediakan hardcopy Laporan Tahunan pada saat Rapat. Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan hardcopy Laporan Tahunan, maka Pemegang Saham dapat menyampaikan permintaan tertulis terlebih dahulu melalui e-mail ke [1] paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 27 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
- Demi alasan kesehatan dan kepatuhan protokol Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun souvenir/cinderamata kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- Demi kelentihan Rapat, mohon agar para Pemegang Saham/Kuasanya yang akan hadir secara fisik dapat hadir dan berada di lokasi Rapat serta mulai mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2020  
Direksi Perseroan



SUASANA TEPI SUNGAI SARAYU DI INDIA

Kuil dan bangunan lain di tepi sungai Sarayu di-terangi lampu menjelang upacara peletakan batu untuk kuil Hindu di Ayodhya, India, Selasa (4/8).

## PBB: Dunia Sedang Hadapi Bencana Generasi dalam Pendidikan

NEW YORK(IM) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (4/8) memperingatkan bahwa dunia menghadapi "bencana generasi" akibat penutupan sekolah di tengah pandemi virus korona. Ia juga mengatakan kembali membawa siswa bersekolah secara aman harus menjadi prioritas utama.

Guterres menyebutkan bahwa pada pertengahan Juli terjadi penutupan sekolah di 160 negara sehingga berdampak pada lebih dari 1 miliar siswa. Selain itu, sedikitnya 40 juta anak ketinggalan sekolah pendidikan dini.

Ini terjadi di atas lebih dari 250 juta anak yang telah keluar sekolah sebelum pandemi dan hanya seperempat dari siswa sekolah menengah di negara berkembang lulus dengan keterampilan dasar, katanya melalui pernyataan.

"Kini kita menghadapi bencana generasi yang dapat menyebabkan potensi manusia jadi sia-sia, mengacukan kemajuan puluhan tahun dan mempertajam ketidaksetaraan yang mengakar," kata Guterres saat meluncurkan kampanye "Selamatkan Masa Depan Kami" yang diusung oleh PBB.

"Begitu transmisi Covid-19 lokal terkendali, mengizinkan siswa kembali ke sekolah dan lembaga pendidikan seaman mungkin harus menjadi prioritas utama.

Konsultasi dengan orang tua, wali, guru serta kaum muda menjadi hal mendasar," katanya. Rekomendasi PBB agar pendidikan global kembali ke jalurnya muncul saat Presiden AS Donald Trump yang meminta agar sekolah kembali dibuka menghadapi penentangan dari sejumlah guru dan orang tua sementara Covid-19 melonjak di banyak wilayah negara tersebut.

Virus corona, yang pertama kali muncul di Tuongkok tahun lalu, telah menginfeksi 4,6 juta orang di AS dan membunuh lebih dari 155 ribu warga Amerika sejak Februari, menurut hitungan Reuters. Kematian naik di atas 25 ribu pada Juli dan kasus meningkat dua kali lipat di 19 negara bagian.

Secara global virus korona telah menginfeksi 18,1 juta orang dengan lebih dari 689 ribu kematian, menurut data Reuters. ● gul

**PENGUMUMAN**

Direksi Perseroan PT. KERTIA GAYA PUSAKA, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan mengalihkan/menjual seluruh saham-sahamnya kepada pihak lain.

Bagi mereka yang merasa berkepentingan dan keberteratan atas pengalihan tersebut harap segera menghubungi sdr. Warsito Hp. 08121018592 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini harap dimaklumi.

Direksi  
Drs. MURTIYONO SURYOPUTRO